

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Yoaneth Selvita Saknosiwi<sup>1</sup>, Josep B. Kalangi<sup>2</sup>, Krest D. Tolosang<sup>3</sup>

*Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,*

*Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia*

*Email : [yoanethselvitasaknosiwi@gmail.com](mailto:yoanethselvitasaknosiwi@gmail.com)*

### ABSTRAK

Salah satu unsur yang paling penting dalam pembangunan daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berhasil guna dan berdaya guna. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dilakukan untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta diperlukan pengelolaan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Keleluasan yang dimiliki daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta kinerja pemerintah daerah untuk mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih baik. Adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi serta pengelolaan keuangan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif dengan pendekatan secara Kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui pencarian data dan pengumpulan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow dan Visualisasi Data APBD Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas 5 tahun terakhir masih berada pada rasio di atas 100 % kondisi ini menunjukkan pengelolaan pendapatan daerah semakin efektif. Untuk tingkat efisiensi selama 5 tahun terakhir masih belum efisien karena rasionya belum mencapai rasio dibawah 90 %. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow masih kurang baik.

**Kata Kunci:** APBD, Efektivitas, Efisiensi

### ABSTRACT

*One of the most important elements in regional development is how to manage regional finances in an effective and efficient manner. Good regional financial management is carried out to realize regional autonomy and decentralization that is broad, real and accountable and requires effective, efficient, transparent and accountable regional management. The flexibility of the regions is expected to increase regional financial independence and government performance to encourage more economic development. good. This research is to determine the level of effectiveness and efficiency as well as financial management and its impact on economic development in Bolaang Mongondow Regency. This research uses descriptive analysis method with a quantitative approach. The data used in this study are secondary data through data search and data collection from the Central Bureau of Statistics of Bolaang Mongondow Regency and the Ministry of Finance's APBD Data Visualization. The results showed that the level of effectiveness in the last 5 years was still at a ratio above 100%. This condition shows that regional revenue management is increasingly effective. for the level of efficiency during the last 5 years it is still not efficient because the ratio has not reached a ratio below 90%. This indicates that the regional financial management system by the Bolaang Mongondow district government is still not good.*

**Keywords:** APBD, Effectiveness, Efficiency

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Seiring dengan diberlakukannya penerapan otonomi daerah terhadap setiap daerah yang telah diberikan kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, disisi lain memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan melaksanakan program – program pembangunan di daerah, sehingga perlu menuntut kesiapan daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan berbagai kebijakan dan strategi daerah dalam pembangunan ekonomi daerah yang sangat mutlak dibutuhkan untuk diterapkan dalam proses mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, untuk itu sangat perlu peran pemerintah untuk mendorong serta meningkatkan kapasitas pembangunan ekonomi daerah dengan berdasar pada kondisi serta potensi yang dimiliki daerah karena pemerintah yang dianggap lebih mengenal daerahnya sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya melalui otonomi daerah yang diberikan.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah secara umum yaitu untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi, dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada publik serta mendorong demokrasi di daerah. Sedangkan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan pada publik dengan maksimal, maka salah satu cara yang dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan yaitu mengimplementasikan kebijakan di bidang perencanaan keuangan yang taat prosedur. Pengelolaan keuangan daerah, khususnya penganggaran di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, yang merupakan inti dari kewajiban daerah, DPRD, dan Kepala Daerah. Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam rangka "mewujudkan masyarakat Bolaang Mongondow yang berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera" dibutuhkan kemampuan manajemen yang handal, maka faktor dominan dalam penganggaran akan memberikan manfaat yang positif bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

**Tabel 1 Target Penerimaan, Realisasi Penerimaan, Target Pengeluaran dan Realisasi Penerimaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow**

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Target Pengeluaran	Realisasi Pengeluaran
2014	666.352.353.280	677.232.334.672	692.464.058.368	668.160.063.705
2015	739.310.632.960	809.358.151.745	767.181.258.752	823.968.657.331
2016	1.027.359.178.752	925.585.663.950	1.035.975.917.568	953.193.868.708
2017	968.930.623.488	1.039.637.390.875	991.930.613.760	1.031.364.819.321
2018	1.027.359.146.916	1.028.718.826.637	1.035.975.889.645	1.005.941.101.777

Sumber : Visualisasi Data APBD Kementerian Keuangan/ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.

3. Untuk mengetahui dampak efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Selain itu membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang.

### Pengertian Efektivitas dan Efisiensi

Sektor publik sering di nilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan sumber kebocoran dana dan institusi yang selau merugi. Oleh karena itu Mardiasmo (2004:4) mendefinisikan bahwa : Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di tetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Pengertian efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang di maksud dapat bermacam – macam, tergantung dari pada sasaran atau tujuan yang ingin di capai atau yang telah di tetapkan. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan.

### Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan menuju perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Adapun dampak positif dan negatif dari pembangunan ekonomi sebagai berikut :

Dampak positif :

1. Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
2. Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran.
3. Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional.
4. Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis.
5. Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM sehingga dalam hal ini, dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian, akan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak negatif :

1. Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup.
2. Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian.
3. Hilangnya habitat alam, baik hayati atau hewani.

### Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu di catat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah di anggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004 ; 134 ).

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (outcome). Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2007 ; 84) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumusan ini penilaian atas efektivitas dinyatakan sangat efektif apabila hasil perhitungan di atas 100 %.

### **Pengukuran Efisiensi**

Efisiensi di ukur dengan ratio antara output dengan input. Semakin besar output di banding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo 2004;133). Dengan demikian efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumusan tersebut penilaian efisiensi dikatakan sangat efisien apabila hasil perhitungan di bawah 60 %. Karena efisiensi di ukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan input.
3. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
4. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi penurunan output.

Dalam pengukuran kinerja pengelolaan organisasi sektor public, efisiensi dapat di bedakan atas :

- a. Efisiensi Alokasi  
Terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat efektivitas optimal.
- b. Efisiensi Teknis (Manajerial)  
Terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumberdaya input pada tingkat output tertentu.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari data target penerimaan, realisasi penerimaan, target pengeluaran dan realisasi pengeluaran APBD Kabupaten Bolaang

Mongondow. Data yang digunakan berupa data periode tahunan. Sumber data diperoleh dari Visualisasi Data APBD Kementerian Keuangan dan BPS Kabupaten Bolaang Mongondow.

### Prosedur Penelitian

1. Dilakukan pengamatan dengan tahap konseptual kemudian menemukan sebuah topik permasalahan yang akan dibahas merumuskan dan mengidentifikasi masalah, meninjau kepustakaan yang relevan, mendefinisikan kerangka teoritis.
2. Memilih rancangan penelitian, mengidentifikasi untuk mengukur variabel penelitian
3. Penyusunan proposal berdasarkan masalah yang diamati
4. Membuat instrumen dan pengumpulan data penelitian.
5. Melakukan pengolahan data
6. Mendesain hasil penelitian pada tahap akhir dan disusun dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian.

### Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder jenis data yang dilakukan melalui pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow dan Visualisasi data APBD Kementerian Keuangan. Data APBD yang digunakan adalah berdasarkan laporan target dan realisasi anggaran tahun 2014 – 2018. dan dengan cara penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku literatur dan referensi lainnya, termasuk hasil - hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

### Metode Analisis

Metode yang dipakai pada penulisan ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan secara kuantitatif untuk mengetahui tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi penerimaan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan uraian sebagai berikut.

Untuk mengatur tentang kriteria efektivitas penerimaan daerah, yakni sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 penentuan penerimaan daerah pedoman penilaian kinerja keuangan.

**Tabel 2 Kriteria Kinerja Keuangan ( Efektivitas )**

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Di bawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi ( 2010;124)

Untuk mengatur tentang kriteria Efisiensi penerimaan daerah, yakni sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 penentuan penerimaan daerah. Pedoman penilaian kinerja keuangan sebagai berikut :

**Tabel 3 Kriteria Kinerja Keuangan ( Efisiensi )**

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat efisien

Sumber : Mahmudi ( 2010;124)

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Operasional variabel dan Pengukuran variabel yang akan diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Penerimaan daerah yaitu total penerimaan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow baik yang ditargetkan maupun yang terealisasi pada satu tahun anggaran yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
2. Variabel pengeluaran daerah yaitu total pengeluaran daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang terealisasi pada satu tahun anggaran yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menjalankan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Sangat penting bagi pemerintah untuk mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahnya, terutama pada sisi penerimaannya, karena jika pendapatan yang diterima pemerintah telah efektif berarti pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan tugasnya dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Untuk menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dilihat dari perbandingan realisasi penerimaan dengan target penerimaan, dimana semakin tinggi angka capaian yang diperoleh maka semakin efektif pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 4 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2014 - 2018**

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2014	666.352.353.280	677. 323.334.672	101.64	Sangat efektif
2015	739.310.632.960	809.358.151.745	109.47	Sangat efektif
2016	1.027.359.178.752	925.585.663.950	90.09	Efektif
2017	968.930.623.488	1.039.637.390.874	100.73	Sangat efektif
2018	1.027.359.146.916	1.028.718.824.632	100.13	Sangat efektif

Sumber: Visualisasi Data APBD Kementerian Keuangan/BPS Kabupaten Bolaang Mongondow (data di olah)

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow pada periode tahun 2014-2018 menunjukkan tingkat efektivitas yang tergolong sangat efektif, karena mencapai tingkat diatas 100% yang berarti sangat efektif atau tingkat efektivitasnya sangat tinggi. Dimana pada tahun 2014 sebesar 101.64% atau berada pada kriteria sangat efektif. Kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 109.47% dan tetap berada pada kriteria sangat efektif. Setelah itu pada tahun 2016 kondisi pengelolaan keuangan daerah menurun menjadi 90.09% sehingga berada pada kriteria yang efektif, dan kemudian naik pada tahun 2017 dan tahun 2018 dengan peningkatan sebesar 100.73% dan 100.13%. Angka capaian ini mengindikasikan bahwa efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow semakin efektif dari tahun ke tahun walaupun terjadi fluktuasi setiap tahunnya.

#### **Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow**

Tingkat Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan daerah dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila angka yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil tingkat efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh penerimaan yang diterima. Sehingga dapat dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan Daerahnya itu lebih besar dari pada realisasi penerimaan yang diterima. Tabel 4.4 adalah tingkat efisiensi Penerimaan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2018.

Untuk menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di lihat dari perbandingan realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan, dimana semakin kecil tingkat efisiensi maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut.

**Tabel 5 Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2014 -2018**

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Pengeluaran (Rp)	Efisiensi (%)	Keterangan
2014	677.232.334.672	668.160.063.705	98.62	Kurang efisien
2015	809.358.151.745	823.968.657.331	101.80	Tidak efisien
2016	925.585.663.950	953.193.868.708	102.98	Tidak efisien
2017	1.039.637.390.874	1.031.364.619.000	99.20	Kurang efisien
2018	1.028.718.826.637	1.005.941.101.777	97.78	Kurang efisien

*Sumber: Visualisasi Data APBD Kementerian Keuangan/BPS Kabupaten Bolaang Mongondow (data di olah)*

Berdasarkan Tabel 5 hasil perhitungan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dari tahun 2014-2018 menunjukkan tingkat efisiensi yang masih berada di atas 90%, hasil perhitungan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2014 sebesar 98.62% sehingga berada pada kriteria kurang efisien. Kemudian semakin naik di tahun 2015 dan tahun 2016 dengan peningkatan sebesar 101.80% dan 102.98% sehingga menunjukkan kondisi pengelolaan keuangan daerah berada pada posisi tidak efisien. Dan pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018 tingkat efisiensi tersebut kemudian menurun menjadi 99.20% dan 97.78% namun tetap masih berada pada posisi kurang efisien. Hal Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow masih sering terjadi fluktuasi,

karena belum mampu menekan biaya-biaya dan merealisasikan target dengan baik sehingga yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang melebihi anggaran.

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2014 – 2018. Terlihat bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diatas seratus persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menengelola keuangan daerahnya semakin efektif.
2. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selama lima tahun yaitu dari tahun 2014 – 2018. Terlihat bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang efisien. Kondisi ini terjadi karena realisasi penerimaan daerah lebih kecil dari pada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target penerimaan daerah tersebut.
3. Pengelolaan keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow yang berada pada tingkat yang efektif menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow pada lima tahun berjalan senantiasa mengalami perubahan yang terus menerus menuju perbaikan yang dilihat dengan adanya struktur ekonomi yang semakin beragam, terciptanya kesempatan kerja yang dapat mengurangi pengangguran, dan secara langsung dapat memperbaiki pendapatan masyarakat, kemudian peningkatan kualitas hidup manusia yang semakin berkembang dan juga terjadi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang ditandai dengan angka harapan hidup. Hal ini tentu berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow edisi 2015/2016/2017/2018/2019/2020. *Bolaang Mongondow dalam Angka*. BPS.
- Dwi Nofita Sari, Sri Mintarti, Salmah Pattisahusiwa, (2018). *Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Harry P. Paat Grace B. Nangoi Rudy J. Pusung, (2019). *Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah kota tomohon*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi.
- Heru Fahlevi, Muhammad Reza Ananta, (2015). *Analisis efisiensi dan efektifitas anggaran belanja langsung (Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh)* University of Syiah Kuala, Aceh, Indonesia.
- Mahmudi (2007), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.;
- Mardiasmo (2004), *efisiensi dan efektifitas*, penerbit Andy Jakarta.
- Mahmudi (2010), *Manajemen Keuangan Daerah*. PT Erlangga: Jakarta
- Ni Nyoman Suryaningasih, Made Suyana Utama, I.N. Mahaendra, (2015). *Dampak Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (UNUD), Bali, Indonesia
- Novelya Suoth, Jantje Tinangon, Sintje Rondonuwu, (2016). *Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pengelola keuangan, pendapatan dan aset*

- (DPKPA) kabupaten minahasa selatan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Ritno H. Rondonuwu, Jantje J. Tinangon, Novi Budiarmo, (2014). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Roland Gerald Tooy, David Paul Elia Saerang Lidia Mawikere, (2016). *Analisis efisiensi dan efektivitas laporan realisasi anggaran di badan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan (BAPPELITBANG) kabupaten minahasa utara*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Sony Kristiyanto, Sugeng Widodo, (2017). *Analisis efisiensi belanja langsung dan tidak langsung pemerintah kabupaten kota di jawa timur dalam pengentasan kemiskinan*. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Sunanto, (2017). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Musi Banyuasin*. Akuntansi Politeknik Sekayu.
- Vera Sri Endah Cicilia, Sri Murni, Daisy M. Engka, (2014). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara*. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 penentuan penerimaan daerah pedoman penilaian kinerja keuangan. Jakarta
- [Apbd pengertian unsur jenis fungsi dantujuan.https://www.kompas.com/2020](https://www.kompas.com/2020)
- [Dasar hukum otonomi daerah https://www.daftarinformasi.com.](https://www.daftarinformasi.com)
- [Pembangunan ekonomi https://id.wikipedia.org/wiki](https://id.wikipedia.org/wiki)
- [Pengelolaan keuangan daerah https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-12-2019.](https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-12-2019)
- [Visualisasi Data Apbd http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd.](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd)